

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEBARAN KOMANDO GABUNGAN WILAYAH PERTAHANAN I GUNA MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Laeli Maria Ulfah, Agus Sudarya, Nora Lelyana, Christine Sri Marnani

INDONESIA DEFENSE UNIVERSITY

(Laelimariaulfah10@gmail.com, agus.sudarya@idu.ac.id, nora.lelyana@idu.ac.id,
christinemarnani@yahoo.com)

Abstrak - Indonesia adalah negara kepulauan luas yang memiliki SDA dan SDM serta melekat multidimensi unsur SARA. Perkembangan ancaman internal dan eksternal yang semakin kompleks sehingga memerlukan sistem pertahanan negara yang tangguh dan mampu menimbulkan deterrence effects. Peran Kogabwilhan untuk memadukan interoperabilitas TNI sehingga dibentuk Kebijakan Penyebaran Kogabwilhan. LCS termasuk ancaman regional yang berpotensi menjadi ancaman nasional sehingga perlu penguatan pangkalan dengan dibentuknya Kogabwilhan I. Tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyebaran Komando Gabungan Wilayah I guna mendukung sistem pertahanan negara dan menganalisis kendala-kendalanya. Metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuisioner. Proses analisis data dimulai setelah data terkumpul. Kemudian kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa analisis implementasi kebijakan penyebaran Kogabwilhan I guna mendukung sistem pertahanan negara sudah terlaksana sehingga memberikan dampak bagi publik dengan munculnya pandangan masyarakat wilayah barat mengenai Kogabwilhan I secara positif. Analisis kendala-kendala pada implementasi kebijakan penyebaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I guna mendukung sistem pertahanan negara terletak pada jumlah personil yang belum terpenuhi dari jumlah yang tersedia, keterbatasan fasilitas dan sarana-prasarana, serta komunikasi dan koordinasi dengan instansi selain TNI yang masih mengalami hambatan tertentu.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pertahanan, Kogabwilhan I, Penyebaran, Sistem Pertahanan Negara.

Abstract - Indonesia is a vast archipelago country that has natural resources and human resources and is attached to the multidimensional elements of SARA. The development of internal and external threats that are increasingly complex requires a strong national defense system capable of causing deterrence effects. The role of the Kogabwilhan is to integrate the interoperability of the TNI so that the Kogabwilhan Deployment Policy is formed. LCS is a regional threat that has the potential to become a national threat so that the strengthening of the base with the formation of Kogabwilhan I. This aims to analyze the implementation of the policy for the deployment of the Regional I Joint Command to support the national defense system and analyze its obstacles. This research uses a qualitative research method with a descriptive analytical design. The data collection technique in this research uses interviews, observation, documentation, and questionnaires. The data analysis process starts after the data is collected. Then data condensation, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of this research show that the analysis of the implementation of the Kogabwilhan I deployment policy to support the national defense system has been carried out so that it has an impact on the public with the emergence of a positive view of the western community regarding Kogabwilhan I. Analysis of the constraints on the implementation of the policy for the deployment of the Joint Regional Defense Command I to support the national defense system lies in the number of unfulfilled personnel from the available number, limited facilities and infrastructure,

as well as communication and coordination with agencies other than the TNI who still experience certain obstacles.

Keywords: *policy implementation, defense policy, deployment, Kogabwilhan I, national defense system*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut dibuktikan dengan data bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan luas 7,81 juta km² meliputi wilayah daratan 2,01 juta km² dan wilayah laut 5,8 juta km² yang dicantumkan pada Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 poin konstelasi geografis Indonesia (Keputusan Panglima TNI, 2018). Di dalam tubuh negara Indonesia itu sendiri terdapat multidimensi dan kompleksitas yang melekat erat pada unsur-unsur Suku, Agama, Ras, dan Budaya (SARA). Eksistensi keanekaragaman SARA tersebut sangat mempengaruhi terhadap dinamika sistem pertahanan negara. Perbedaan-perbedaan yang bervariasi cenderung memicu terjadinya berbagai polemik dalam negeri apabila tidak dikelola secara tepat.

Selain itu Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah sehingga tidak sedikit negara asing yang tertarik untuk mengeksploitasinya dengan melakukan cara-cara tertentu. Merefleksikan kembali pada sejarah yakni salah satu alasan Belanda dan Jepang menjajah Indonesia karena ingin memonopoli sumber daya alam yang terdapat di bumi nusantara. Dikaitkan dengan fenomena sekarang fakta sejarah tersebut pada hakikatnya menginstruksikan bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah nusantara yang sangat luas harus selalu ditingkatkan dan diperjuangkan secara berkelanjutan.

Perubahan lingkungan strategis dari masa ke masa terus mengalami eskalasi di semua bidang. Apalagi munculnya globalisasi yang semakin mempengaruhi dinamika ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan teknologi. Perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung sudah menjadi keniscayaan berdampak pada kondisi sistem pertahanan negara. Mengingat secara geografi Indonesia berada di jalur strategis yakni berada di antara Samudera Hindia dan Samudra Pasifik; Benua Asia dan Benua Australia yang menjadi lintas perdagangan dunia sehingga rawan terserang AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan).

Menelisik realita di atas negara Indonesia sudah sepantasnya mempersiapkan segala daya dalam rangka menghadapi serangan AGHT baik dari sisi militer maupun non militer. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya pembangunan pertahanan militer dilakukan dengan mewujudkan penataan organisasi melalui pembangunan 3 (tiga) wilayah pertahanan, yang dimaksudkan untuk mewujudkan strategi militer yang bersifat Trimatra Terpadu. Pembangunan tetap berorientasi pada pembentukan Kogabwilhan yang didukung oleh profesionalisme dan kesejahteraan prajurit dalam rangka mewujudkan pertahanan maritim yang berperan sebagai pilar dalam menopang Poros Maritim Dunia. Pertahanan militer diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif, dan menyusun

pertahanan berlapis guna menghadapi ancaman (Tim Penyusun BPPI, 2015).

Berkaca pada fakta Indonesia yang berada di posisi strategis dan dikelilingi negara tetangga ataupun pangkalan milik negara adidaya menjadikan bangsa ini berpotensi mempunyai ancaman militer sehingga harus siap siaga. Disamping itu ancaman yang kini merebak adalah ancaman nirmiliter seperti perang mindset, disintegrasi bangsa, munculnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, korupsi merajalela, penyelundupan narkoba, degradasi moral, dan lain sebagainya. Dari fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan bahwa dalam menjaga stabilitas nasional memerlukan keterlibatan tiga matra secara terpadu. Aktivitas tersebut didukung dengan terbentuknya Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) sesuai (Keppres, 2019).

Menurut Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P Kogabwilhan merupakan representasi konsep kemampuan interoperabilitas TNI, yang saat ini menjadi kebijakan prioritas bagi pimpinan TNI. Ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia akan terus berevolusi, sehingga membutuhkan keterpaduan kekuatan matra (darat, laut dan udara) dalam merespon ancaman tersebut. Munculnya ancaman tersebut perlu diantisipasi dan dicermati dalam menyusun pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan gelar kekuatan TNI di masa mendatang, sehingga dapat bersifat adaptif. Selain itu sebagai Kotamaops TNI, Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal apabila terjadi konflik di wilayahnya baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar sesuai dengan

kebijakan Panglima TNI (Tim Publikasi Admin, 2018).

Secara cakupan wilayah, ancaman dibagi menjadi tiga macam yaitu ancaman global, ancaman regional, dan ancaman nasional. Ancaman global adalah ancaman yang terjadi dalam skala internasional. Contoh dari ancaman global seperti hegemoni, *proxy war*, perang dagang, dan multi-polar. Ancaman regional merupakan ancaman yang lokasinya mencakup kawasan benua. Contoh ancaman regional dapat dilihat pada kasus konflik Laut China Selatan, kejahatan transnasional, perdagangan manusia, dan Pacific Nation. Ancaman nasional ialah ancaman yang menyerang wilayah nasional (dalam negeri). Ancaman nasional di Indonesia dapat ditunjukkan pada fenomena konflik horizontal, konflik SARA, terorisme, narkoba, Organisasi Papua Merdeka, bencana alam, dan lain sebagainya (Moeldoko, 2019).

Ancaman global yang menjadi sorotan banyak kalangan terhadap Indonesia yakni pandemik Covid-19. Pada awal Maret 2020 sampai sekarang munculnya wabah pandemik Covid-19 masih terus bergerilya sehingga mempengaruhi berbagai bidang baik itu bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Dalam menghadapi pandemik, Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa semua elemen bangsa terlibat termasuk TNI. Merebaknya ancaman Covid-19 TNI berperan penting melalui pembentukan Kogasgabpad (Komando Tugas Gabungan Terpadu). Kogasgabpad tersebut dibagi di empat pulau yakni Jakarta, Sebaru, Natuna, dan Bukit Barisan (Sari, 2020).

Ancaman regional yang sudah sepatutnya untuk diwaspadai adalah konflik di Laut China Selatan. Sebab konflik tersebut sudah terjadi dalam

waktu yang lama dan berpotensi menjadi ancaman nasional. Laut China Selatan yang mengandung banyak kekayaan sumber daya alam menjadi alasan utama bagi negara yang bersengketa saling bersaing untuk menguasainya. Fenomena tersebut tentu mempengaruhi stabilitas nasional karena berdekatan dengan Kepulauan Natuna yang bisa jadi sumber terjadinya perbenturan antara Indonesia dengan China maupun negara tetangga yang bersengketa (Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam). Oleh karena itu pangkalan di Kepulauan Natuna diperkuat dengan dibentuknya Kogabwilhan I.

Di saat ancaman global (VirusCovid-19) belum juga berhenti, Amerika Serikat dengan Rakyat Republik Tiongkok (China) semakin memanas. Fenomena tersebut tentu berpengaruh pada daerah yang sudah lama mengalami konflik tepatnya di kawasan Laut China Selatan yang berdekatan dengan Laut Natuna Utara dan sekitarnya. Dalam merespon fakta yang sedang terjadi, Pangkogabwilhan I menanggapi melalui taktik mengatur langkah dengan melaksanakan patroli udara secara rutin di kawasan tersebut (Rinovsky, 2020).

Amerika Serikat turut andil dalam upaya penyelesaian sengketa konflik Laut China Selatan tidak murni untuk masalah teritorial saja. Meskipun Amerika Serikat tidak termasuk negara yang terlibat langsung pada konflik tersebut tetapi ikut aktif karena munculnya kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok telah berpengaruh terhadap jalur pelayaran strategis internasional yang mengubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu Amerika Serikat juga haus akan sumber daya alam khususnya minyak gas dan bumi sehingga selalu bersikeras supaya

pengaruh Tiongkok tidak melebar luas. Fenomena tersebut sesuai prediksi Tiongkok yang menargetkan pada 2020 nanti militernya mampu menempati kriteria disegani secara regional. Hal tersebut tentu membuat Amerika Serikat tidak ingin kehilangan hegemoninya dalam memimpin kekuatan militer di Asia Pasifik (Risdhianto, 2014).

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan merupakan ancaman faktual dari kompleksitas polemik maritim. Konflik yang bersumber dari pengklaiman wilayah lebih kurang 1.3 juta mil² dengan cakupan wilayah dari Selat Malaka dan Selat Singapura sampai Selat Taiwan. Setiap negara yang terlibat dalam sengketa, masing-masing mengakui dengan alasan-alasan maupun pembenaran terhadap Kepulauan Paracel dan Spratly untuk bisa mengklaim ZEE perairan tersebut (Marsetio, 2018).

Indonesia pada dasarnya tidak terlibat di konflik Laut China Selatan. Namun, konflik yang menjadi ancaman regional tersebut memiliki dampak bagi stabilitas nasional Indonesia khususnya kepulauan Natuna. Mengingat Taiwan dan China (RRT) sama-sama pernah mengklaim seluruh kawasan Laut China Selatan. Bahkan pernah menganggap Natuna merupakan bagian dari daerah kekuasaan mereka (Ma, 2006).

Disamping ancaman dipandang dari segi cakupan wilayah, ancaman juga dapat dilihat dari segi dimensi. Ancaman secara dimensi dibagi menjadi enam jenis dimensi. Dimensi-dimensi tersebut terdiri dari dimensi politik, ekonomi, sosial, militer, lingkungan, dan informasi. Dari enam dimensi tersebut ancaman faktual maupun potensial yang ada di Indonesia sangat kompleks dan bisa dilihat pada tabel.

Tabel 1 Ancaman Dimensi di Indonesia
sumber: (Moeldoko, 2019).

No	Dimensi	Ancaman
1	Politik	<i>Proxy of Papua</i>
2	Ekonomi	Krisis dan Kesenjangan
3	Sosial	SARA dan Otonomi
4	Militer	LCS, Garwil, dan Perlombaan Senjata
5	Lingkungan	Bencana dan Pencemaran
6	Informasi	<i>Proxy, Cyber, dan Media Sosial</i>

Salah satu ancaman regional yang berpotensi menjadi ancaman nasional adalah konflik di Laut China Selatan yang merupakan jenis ancaman dimensi militer. Konflik Laut China Selatan yang berpengaruh pada kondisi pulau Natuna termasuk ancaman non tradisional karena konflik tersebut dilatarbelakangi oleh invasi militer negara-negara lain yang bersengketa. Konflik tersebut menjadi peting untuk diwaspadai sebab pelanggaran kapal ikan dan Coast Guard China tidak hanya satu kali dua kali terjadi di ZEE Indonesia. Di satu sisi ancaman non tradisional seperti radikalisme, trafficking, narkoba, perampokan, dan perompakan masih seringkali terjadi. Ancaman tradisional maupun non tradisional tersebut dapat dipersepsikan sebagai AGHT yang serius di masa yang akan datang terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia jika sistem pertahanan negara tidak dimanajemen dengan tepat.

Negara pada hakikatnya merupakan organisasi publik sudah pasti memiliki tujuan nasional. Dalam proses mencapai tujuan nasional suatu negara akan membentuk kebijakan yang relevan dengan kondisi wilayah untuk

diimplementasikan sehingga tujuan akan tercapai. (Tachjan, 2006), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses yang tidak sederhana karena ditentukan keberhasilan dari dimensi organisasi, kepemimpinan, juga manajerial pemerintah selaku otoritas utama.

Munculnya ancaman-ancaman yang telah dijelaskan di sebelumnya menandakan bahwa peran Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) sangat penting terhadap sistem pertahanan negara. Hal tersebut karena didasari dari kebijakan penyebaran Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) yang bertumpu pada interoperabilitas tiga matra (TNI AD, AU, dan AL) untuk menjaga kedaulatan wilayah nusantara. Konflik di Laut China Selatan mempengaruhi stabilitas kawasan regional dan nasional sehingga Indonesia perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan militer baik ketika OMP (Operasi Militer Perang) maupun pada saat OMSP (Operasi Militer Selain Perang).

Kebijakan Penyebaran Kogabwilhan berperan penting bagi kelangsungan bangsa baik itu Kogabwilhan I, Kogabwilhan II, ataupun Kogabwilhan III. Kogabwilhan I (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) yang berpusat di Tanjungpinang mempunyai amanah besar dalam mendukung sistem pertahanan negara. Terlebih lagi wilayah kerja di pulau Natuna yang rawan dari pengaruh konflik Laut China Selatan. Namun sejauh ini belum pernah ada peneliti yang melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan penyebaran Kogabwilhan I (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) guna mendukung sistem pertahanan negara.

Kogabwilhan I termasuk organisasi TNI yang belum lama berdiri yang

bertanggungjawab kepada Panglima TNI. Kogabwilhan I memiliki peran penting yakni sesuai Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang didalamnya mengatur penyelenggaraan OMP dan OMSP. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan penyebaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I guna mendukung sistem pertahanan negara dan menganalisis kendala-kendala pada implementasi kebijakan penyebaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I guna mendukung sistem pertahanan negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang tidak identik dengan data numerik (Afrizal, 2014). Desain penelitian pada hakikatnya sebuah strategi yang digunakan dalam penelitian sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diawal. Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitis.

Subjek dan Objek

Subjek terdiri dari para narasumber yang bersangkutan (pihak Direktorat Jenderal Pengerahan Komponen Pertahanan, Srenum TNI, dan Kogabwilhan I) serta informan atau responden dari masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja Kogabwilhan I dan memenuhi kriteria. Objek penelitian terfokus pada *“Implementasi Kebijakan Penyebaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara”*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuisisioner. Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan dalam mengumpulkan data semi terstruktur dan mendalam. Pelaksanaan wawancara ada yang secara *off line* dan *on line* karena kondisi masih pandemik Covid-19. Hal tersebut dilakukan supaya memperoleh data maupun informasi yang memenuhi kebutuhan. (Sugiyono, 2015) jenis observasi yang digunakan yakni observasi partisipasi pasif dan terus terang. Observasi partisipasi pasif yaitu peneliti observasi ke lokasi penelitian dengan tidak ikut terlibat kegiatan selama penelitian. Observasi terus terang artinya peneliti diketahui dari awal sampai akhir terkait aktivitas peneliti. Dokumentasi ialah serangkaian proses yang dilakukan dengan mengumpulkan data maupun informasi guna mendukung topik penelitian baik itu berupa gambar, suara, video, atau arsip dokumen. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti-bukti penguat terkait topik penelitian. Pada penelitian ini menggunakan kuisisioner tertutup dan kuisisioner terbuka. Kuisisioner tertutup berisi opsi pilihan yang disediakan oleh peneliti dengan tujuan memberikan kemudahan bagi responden dalam mengisi identitas diri yang membuktikan bahwa responden tersebut sesuai kriteria. Sedangkan kuisisioner terbuka merupakan daftar pertanyaan yang tidak menyediakan opsi jawaban secara tertutup melainkan memberikan kebebasan bagi responden dalam menjawab kuisisioner. Kuisisioner terbuka di penelitian ini berisi pertanyaan dengan maksud memperoleh data yang relevan dengan judul tesis di atas. Dalam penelitian ini peneliti menyebar kuisisioner khusus bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja Kogabwilhan I secara on

line yakni memanfaatkan platform <https://docs.google.com/forms>. Hal tersebut dilakukan supaya lebih efektif dan efisien disamping juga kondisi Indonesia masih pandemik Covid-19.

Uji Keabsahan Data

(Sugiyono, 2015) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa keabsahan data terdiri dari empat yakni uji validitas internal (*credibility*), uji validitas eksternal (*transferability*), realibilitas (*dependability*), dan objektivitas (*confirmability*). Untuk menguji validitas internal (kredibilitas) penelitian ini menggunakan cara triangulasi narasumber. Serangkaian proses tersebut dilaksanakan supaya peneliti memperoleh data yang kredibilitasnya dapat divalidasi atau dipertanggungjawabkan.

Gambar 2 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data (Sumber: diolah oleh peneliti, 2020).



Peneliti menguji validitas eksternal dengan menyusun laporan penelitian yang beracuan pada buku panduan pembuatan tesis. Dari hal tersebut diharapkan para pembaca menjadi lebih muda dalam mengambil informasi, data, ataupun pengetahuan di dalamnya. Pada proses menguji reliabilitas ada *auditor independent* para dosen pembimbing tesis. Selain itu penelitian ini juga diuji oleh para dosen penguji yang telah ditentukan oleh Program Studi Manajemen Pertahanan.

Selanjutnya untuk menguji objektivitas hasil penelitian ini dilakukan melalui proses menghubungkan dengan proses penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap hasil yang diaudit oleh para dosen pembimbing maupun para dosen penguji sehingga *confirmability* bisa diterima secara rasional.

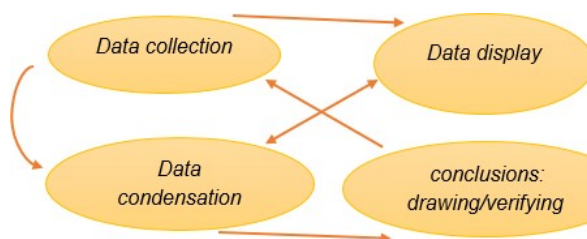
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Miles, Huberman, dan Saldana). Proses analisis data model interaktif terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusions: drawing/verifying*).

- a. Mengumpulkan data. Pada penelitian ini peneliti terlebih dahulu harus sudah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut dilakukan sesuai teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan pada bagian teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi).
- b. Kondensasi data. (Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, 2014) kondensasi data merupakan proses yang merujuk pada memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari hasil pengumpulan data untuk diambil data yang akan disajikan.
- c. Penyajian data. Setelah data direduksi langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menyajikan data hasil reduksi ke dalam bentuk penyajian (diagram, tabel, grafik, dan lain sebagainya).
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti setelah kesimpulan didukung

dengan bukti-bukti yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 1 Analisis Data Model Miles, Huberman, dan Saldana (Sumber: (Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, 2014)).



Hasil dan Pembahasan

Tugas pokok TNI adalah melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Undang-undang tentang TNI pasal 7 (UU Nomor 34, 2004). Berdasarkan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Tentang Organisasi Dan Tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pasal 4 berisi Kogabwilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik diwilayahnya baik untuk OMP maupun OMSP dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya dilaksanakan sesuai kebijakan Panglima (Perpang TNI Nomor 30, 2020). Dari regulasi-regulasi tersebut dapat dikaitkan dengan manajemen pertahanan terhadap pelaksanaan OMP maupun OMSP pada implementasi kebijakan penyebaran Kogabwilhan I guna mendukung sistem pertahanan negara. Dimulai dari perencanaan sampai pengawasan pada pelaksanaan OMP dan OMSP ditujukan untuk mendukung sistem pertahanan negara yang berbasis SISHANTA (Sistem Pertahanan Semesta).

Analisis Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada hakikatnya suatu proses yang berperan penting terhadap keberhasilan dari sebuah penerapan kebijakan publik. Implementasi kebijakan mempunyai variabel-variabel yang menentukan tercapainya suatu tujuan bagi suatu organisasi, instansi, perusahaan, lembaga, bahkan kemajuan bangsa. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu bangsa adalah kondisi sistem pertahanan negara.

Indonesia yang notabene mempunyai kepulauan sangat luas dan terdiri dari beranekaragam komposisi menjadikan bangsa ini agar selalu mawas diri dan siap siaga khususnya dalam mendukung sistem pertahanan negara. Hal tersebut dibuktikan dengan diresmikannya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) pada 27 September 2019. Kogabwilhan terdiri dari tiga pembagian yang dilaksanakan dalam rangka menjaga keutuhan maupun kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan penyebaran Kogabwilhan I guna mendukung sistem pertahanan negara terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain:

- a. Program yang dilaksanakan
Secara garis besar dikelompokkan menjadi OMP dan OMSP. Selanjutnya jika dirincikan terdapat operasi yang telah dilaksanakan dan operasi yang sedang dilaksanakan. Untuk operasi yang telah dilaksanakan terdiri dari Operasi Pengusiran Kapal Nelayan dan Coast Guard China di Laut Natuna Utara pada bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020, Operasi Bantuan Kemanusiaan Evakuasi dan

Observasi Mahasiswa Indonesia dari Wuhan di Natuna pada Bulan Februari 2020, dan Operasi Bantuan Kemanusiaan Evakuasi dan Observasi WNI dari KMV. World Dream dan KMV. Diamond Princess di Pulau Sebaru Kepulauan Seribu pada Maret 2020. Operasi yang sedang dilaksanakan Operasi Siaga Tempur Laut Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia (Wilayah Kalimantan Barat), Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Thailand, Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Singapura, Operasi Patroli Terkoordinasi Malaka Strait See Patrol (MSSP), Operasi Patroli Terkoordinasi Optima (Operasi Tindak Maritim RI-Malaysia), Operasi Patroli Terkoordinasi Malindo, Operasi Patroli Terkoordinasi Indindo, Operasi *Eye In the Sky* (EIS) Malsindothai, Operasi Pengamanan Pulau Terluar (Pulau Rondo, Pulau Sekatung, Pulau Berhala, dan Pulau Nipah), Operasi Keamanan Laut, Operasi Pengamanan ALKI I, Operasi Pengamanan Objek Vital (PT. Pindad, Gupusmu, PT. DI, dan PT. Dahana), Operasi Pengamanan Instalasi (Istana Bogor dan Cipanas), Operasi Pengamanan VVIP, Operasi Patroli Udara, Operasi Pengamatan dan Pengintaian Udara, Operasi Angkutan Udara, Operasi Bantuan Kemanusiaan Penanganan Covid-19, Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan, Operasi Bantuan Kemanusiaan Penanganan Pasien Covid-19 di RSD. Wisma Atlit dan RSK. Pulau Galang-Kepulauan Riau.

- b. Sasaran dari program-program Adanya Kogabwilhan I menjaga keutuhan bangsa dari segala bentuk AGHT (Ancaman,

Gangguan, Hambatan, dan Tantangan). Khususnya untuk wilayah kerja yang mencakup ALKI 1 dan daerah Sumatera, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Banten, serta Jawa Barat. Dan umumnya bagi masyarakat seluruh Indonesia.

- c. Para pelaksana program Satuan-satuan TNI dari Tri Matra tergabung dalam Kogabwilhan I dan dikomandoi oleh Pangkogabwilhan I. Pangkogabwilhan bertanggungjawab kepada Panglima TNI.

- d. Pengaruh lingkungan Pelaksanaan OMP dan OMSP oleh pihak Kogabwilhan I dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis yang semakin dinamis. Fenomena tersebut mendorong munculnya berbagai anekaragam ancaman. Termasuk ancaman fisik maupun ancaman non fisik. Salah satu contoh ancaman non fisik yang masih bergerilya di masa sekarang adalah virus Covid-19. Munculnya virus tersebut merombak tatanan dunia. Bahkan berdampak pada konstelasi di banyak bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Menurut George Edward III ada empat variabel yang menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resource*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*). Masing-masing variabel tersebut saling berhubungan dalam guna mencapai tujuan dari

implementasi kebijakan (Mukarom, 2015).

Tabel 2. Hasil Analisis Implementasi Kebijakan (sumber: diolah oleh peneliti,

No	Analisis implementasi kebijakan	Hasil
1.	Variabel implementasi kebijakan	Secara generalisasi sudah dilaksanakan dengan baik tetapi perlu ditingkatkan lagi.
	a. Komunikasi	Menggunakan sistem komando dan pengendalian.
	b. Sumber daya	Sumber daya manusia, sumber daya finansial, fasilitas dan sarana-prasarana.
	c. Disposisi	Loyalitas tinggi, integritas, dan profesional.
	d. Struktur organisasi	Sudah resmi dan jelas.

2021).

Komunikasi

Komunikasi yang diterapkan oleh pihak Kogabwilhan I menggunakan sistem komando dan pengendalian sehingga tiga dimensi pada komunikasi yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi dapat terlaksana.

- a. Pada dimensi transmisi pihak Kogabwilhan I berkomunikasi dengan baik khususnya di lingkungan internal TNI. Para

pelaksana program dari pimpinan atas sampai satuan-satuan bawah yang terlibat saling berkomunikasi secara efektif dan efisien. Dimulai dari penyusunan program sampai pelaksanaan operasional dilaksanakan dengan berorientasi sistem komando dan pengendalian.

- b. Di dalam dimensi kejelasan dapat ditunjukkan pada isi komunikasi yang disampaikan sudah tersusun secara sistematis dan struktur. Hal tersebut menjadikan para pelaksana program mudah saling berkoordinasi baik untuk di lingkungan internasional maupun eksternal.
- c. Konsistensi yang dilakukan oleh pihak Kogabwilhan I dari sejak dibentuk sampai sekarang membuat komunikasi dapat terjalin dengan baik. Kogabwilhan I yang berisi Tri Matra Terpadu tentu membutuhkan komunikasi yang konsisten sehingga dapat saling mengenal satu sama lain dan mampu beradaptasi dalam menjalankan tugas pokoknya yakni pelaksanaan OMP maupun OMSP.

Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Kogabwilhan I terdiri dari sumber daya manusia (personil), sumber daya finansial, fasilitas, dan sarana-prasarana. Sumber daya tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Kogabwilhan I termasuk organisasi yang belum lama berdiri sehingga optimalisasi penggunaan sumber daya tersebut masih dalam dilakukan secara bertahap.

- a. Sumber daya manusia.
Sumber daya manusia di Kogabwilhan I merupakan

personil TNI dari penggabungan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Sejauh ini jumlah personil belum mencapai 100%. Jangankan Kogabwilhan I, untuk organisasi TNI yang sudah lama berdiri belum tentu juga sudah mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan *Zero Growth Role* sehingga hanya bisa dilaksanakan secara bertahap.

- b. Sumber daya finansial
Sumber daya finansial yang ada di Kogabwilhan I tergantung yang disediakan APBN oleh Pemerintah. Untuk pengelolannya berkoordinasi langsung dengan pihak Mabes TNI bagian Srenum TNI.
- c. Fasilitas dan sarana-prasarana
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di Kogabwilhan I belum sepenuhnya tersedia secara maksimal. Selain karena masih muda usianya juga dipengaruhi oleh kondisi Indonesia yang terserang pandemic Covid-19. Hal tersebut menjadikan banyak pemangkasan anggaran yang dilaksanakan sebagai upaya fokus penanggulangan Covid-19.

Sikap dan Komitmen Para Pelaksana Program (Disposisi)

Sikap dan komitmen dari para pelaksana program sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sikap integritas, loyalitas, profesional, dan anti korupsi. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada fakta semua program di lapangan tetap terlaksana meskipun Kogabwilhan I jumlah personil belum mencapai harapan dan fasilitas maupun sarana-prasarana yang masih terbatas.

Apalagi di masa Covid-19 yang tatanan kehidupan lebih rumit tetapi pihak Kogabwilhan I tetap semangat dan memperjuangkan dengan sikap bela negara secara komprehensif.

Integritas dari para pelaksana kebijakan di lapangan ditunjukkan melalui kepribadian yang mampu membedakan tentang benar dari yang salah, melaksanakan kebenaran meskipun beresiko bagi yang bersangkutan, dan berpendirian teguh terhadap kebenaran. Loyalitas dari para pelaksana kebijakan dapat dilihat dari sikap mereka yang berjuang tanpa pamrih dan setia menjaga kedaulatan wilayah nusantara tercinta.

Profesional dan anti korupsi dari pihak Kogabwilhan I dalam mendukung sistem pertahanan negara dapat dikuatkan dengan adanya nilai-nilai sumber daya manusia pertahanan. Nilai-nilai sumber daya manusia pertahanan yang dimaksud adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin tinggi, dan berbudi pekerti luhur sesuai Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen maupun landasan negara yang tidak lain Pancasila.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Kogabwilhan I sudah tersusun secara resmi. Kogabwilhan I dipimpin oleh Pangkogabwilhan I yang bertanggungjawab langsung kepada Panglima TNI. Struktur birokrasi menggunakan satu komando sehingga para pelaksana program dapat dikendalikan dalam pelaksanaan operasi. Di bawah Kogabwilhan I terdapat satuan-satuan yang berfungsi untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan guna mendukung sistem pertahanan negara.

Analisis Kendala-kendala Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada penyebaran Kogabwilhan I guna mendukung sistem pertahanan negara sudah terlaksana. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Kendala-kendala pada Implementasi Kebijakan (sumber: diolah oleh peneliti, 2021).

No	Kendala	Hasil
1.	Jumlah personil	Belum terpenuhi secara penuh karena untuk pemenuhan jumlah personil hanya bisa dilakukan secara bertahap.
2.	Fasilitas dan sarana-prasarana	Belum memadai dan masih dalam tahap pembangunan
3.	Komunikasi dan koordinasi	Masih kurang dengan pihak di luar TNI.

Jumlah Personil

Sejauh ini lebih kurang jumlah personil yang ada di Kogabwilhan I belum sepenuhnya memenuhi jumlah yang tersedia. Oleh karena itu tidak jarang personil merangkap *job desc*. Fenomena tersebut tentu membuat kurang optimal dibandingkan jika sudah terpenuhi 100%. Apalagi wilayah kerja Kogabwilhan I tergolong luas yakni ALKI 1 dan 6 daerah (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera). Meskipun program-program yang ada tetap terlaksana ketika jumlah personil belum mencapai harapan pasti akan berdampak pada kinerja.

Fasilitas dan Sarana-prasarana

Keterbatasan fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di Kogabwilhan I

tentu menjadi penting untuk di perhatikan. Kogabwilhan I memang masih terbentuk belum lama sehingga perlu terus ditingkatkan khususnya pembangunan fasilitas ataupun sarana-prasarana yang ada. Dengan harapan keterbatasan tersebut bisa diwadahi dan Kogabwilhan I dapat mendukung sistem pertahanan negara secara maksimal melalui pemberdayaan fasilitas dan sarana-prasarana yang memadai.

Komunikasi dan koordinasi

Program OMSP yang biasanya memerlukan koordinasi ataupun komunikasi antar instansi di luar TNI pihak Kogabwilhan I masih mengalami hambatan. Hal tersebut bisa disebabkan karena ego sektoral yang timbul sehingga menimbulkan tumpang tindih pada kewenangan tertentu. Apabila ego sektoral terus berlarut akan berdampak pada publik yang bertendensi negatif sehingga perlu diantisipasi agar tidak terulang kembali.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dari tesis ini dapat diperoleh kesimpulan terkait “Implementasi Kebijakan Penyebaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara”. Kesimpulan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis implementasi kebijakan penyebaran Kogabwilhan I guna mendukung sistem pertahanan negara sudah terlaksana. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program-program yang telah dilaksanakan dan program-program yang sedang dilaksanakan sehingga memberikan dampak bagi publik yakni terbentuknya

pandangan masyarakat wilayah barat mengenai Kogabwilhan I secara mayoritas positif.

- b. Analisis kendala-kendala pada implementasi kebijakan penyebaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I guna mendukung sistem pertahanan negara terletak pada jumlah personil yang belum sepenuhnya terpenuhi dari jumlah yang tersedia, keterbatasan fasilitas dan sarana-prasarana, serta komunikasi dan koordinasi dengan instansi selain TNI yang masih mengalami hambatan tertentu.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Bagi pihak komandan atas disarankan untuk mendukung dengan meningkatkan jumlah personil yang ada.
- b. Bagi pihak Kogabwilhan I sebaiknya terus memperbaiki hubungan kerjasama dengan pihak instansi di luar TNI khususnya terkait komunikasi dan koordinasi.
- c. Bagi pihak Mabes TNI khususnya Srenum TNI agar bisa mengalokasikan dan mengoptimalkan APBN sebagai dukungan meningkatkan kuantitas maupun kualitas terhadap fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di Kogabwilhan I.
- d. Bagi akademisi lainnya yang akan melakukan penelitian dan relevan dengan tesis ini.
- e. Bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berdomisili di wilayah kerja Kogabwilhan I sebaiknya meningkatkan partisipasi dalam mendukung sistem

pertahanan negara baik dengan Kogabwilhan I maupun pemerintah.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Keppres Nomor 27. (2019). *tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A*.
- Keputusan Panglima TNI. (2018). *Nomor Kep/555/VI/2018 Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia*.
- Ma, S. (2006). *China's Multilateralism and the South China Sea Conflict: Quest for Hegemonic Stability?*. National University of Singapore.
- Marsetio. (2018). *Sengketa Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Indonesia*. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3*. United States of America: SAGE Publications Inc.
- Moeldoko. (2019). *Pemindahan Pusat Pemerintahan: Analisis dan Perspektif Pertahanan & Keamanan*. 1-14.
- Mukarom, Z. dan M. W. L. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Perpang TNI Nomor 30. (2020). *Organisasi dan Tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan*.
- Rinovsky, R. (2020). *PangkogabWilhan 1 Melakukan Pantauan Udara Di*

Perbatasan Laut Natuna Utara.
<https://wartakepri.co.id/2020/06/25/pangkogabwilhan-1-melakukan-pantauan-udara-di-perbatasan-laut-natuna-utara/> (Diakses pada 1 September 2020 Pukul 02.00 WIB).

Risdhianto, A. (2014). *Kajian Triwulan I I TA 2014, Pengaruh Tiongkok dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan serta Dampaknya terhadap Indonesia*. Bandung: Seskoad.

Sari, H. P. (2020). *TNI Bentuk Komando Gabungan Tugas Terpadu, Atasi Covid-19 di empat Wilayah*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/13543531/tni-bentuk-komando-gabungan-tugas-terpadu-atasi-covid-19-di-4-wilayah?page=all>. (Diakses pada 1 September 2020 Pukul 02.24 WIB).

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Tim Penyusun BPPI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Tim Publikasi Admin. (2018). *Panglima TNI: TNI Siap Antisipasi Keamanan Kawasan Asia Pasifik*.
<https://tniad.mil.id/panglima-tni-tni-siap-antisipasi-keamanan-kawasan-asia-pasifik/> (Diakses 22 Juli 2020 Pukul 01.31 WIB).

Undang-Undang Nomor 34. (2004). *Tentang Tentara Nasional Indonesia*.